



RENSTRA

**Rencana Strategis
Bakesbangpol
2021-2026**



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lombok Tengah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun di Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini masih jauh dari sempurna, karenanya masukan maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi kita semua.

Praya, 8 September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH" at the top and "BADAN KESBANGPOLDAKRI" at the bottom, separated by two small stars. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "MURDI, AP., M.Si" and the NIP number "NIP. 197512311994121002" are printed in black text.

MURDI, AP., M.Si
NIP. 197512311994121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Kabupaten.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	30
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
5 Strategi dan Kebijakan	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII PENUTUP.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	8
Gambar 3.1	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	13
Tabel 2.2	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	14
Tabel 2.3	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Tabel 2.4	Kualifikasi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural.....	14
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020	16
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020.....	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.....	23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	33
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah	35
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Bakesbangpol selama tahun 2021-2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik, Bakesbangpol memiliki peran dan fungsi sebagai penunjang dalam membantu Bupati Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bakesbangpol diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Bakesbangpol yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Lombok Tengah serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, dan perumusan isu-isu strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu dokumen rancangan awal Renstra perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 tentang Urusan Pemerintahan Umum.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Daerah OPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2)
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah periode 2021-2026.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja -OPD), dan perencanaan penganggaran.
- d. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 LATAR BELAKANG : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat Daerah
- 1.2 LANDASAN HUKUM : memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH : memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : pada bagian ini dikemukakan

permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROV/KAB/KOTA : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
- 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1a. Tahun 2012 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a), selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, maka ditetapkan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Fungsi

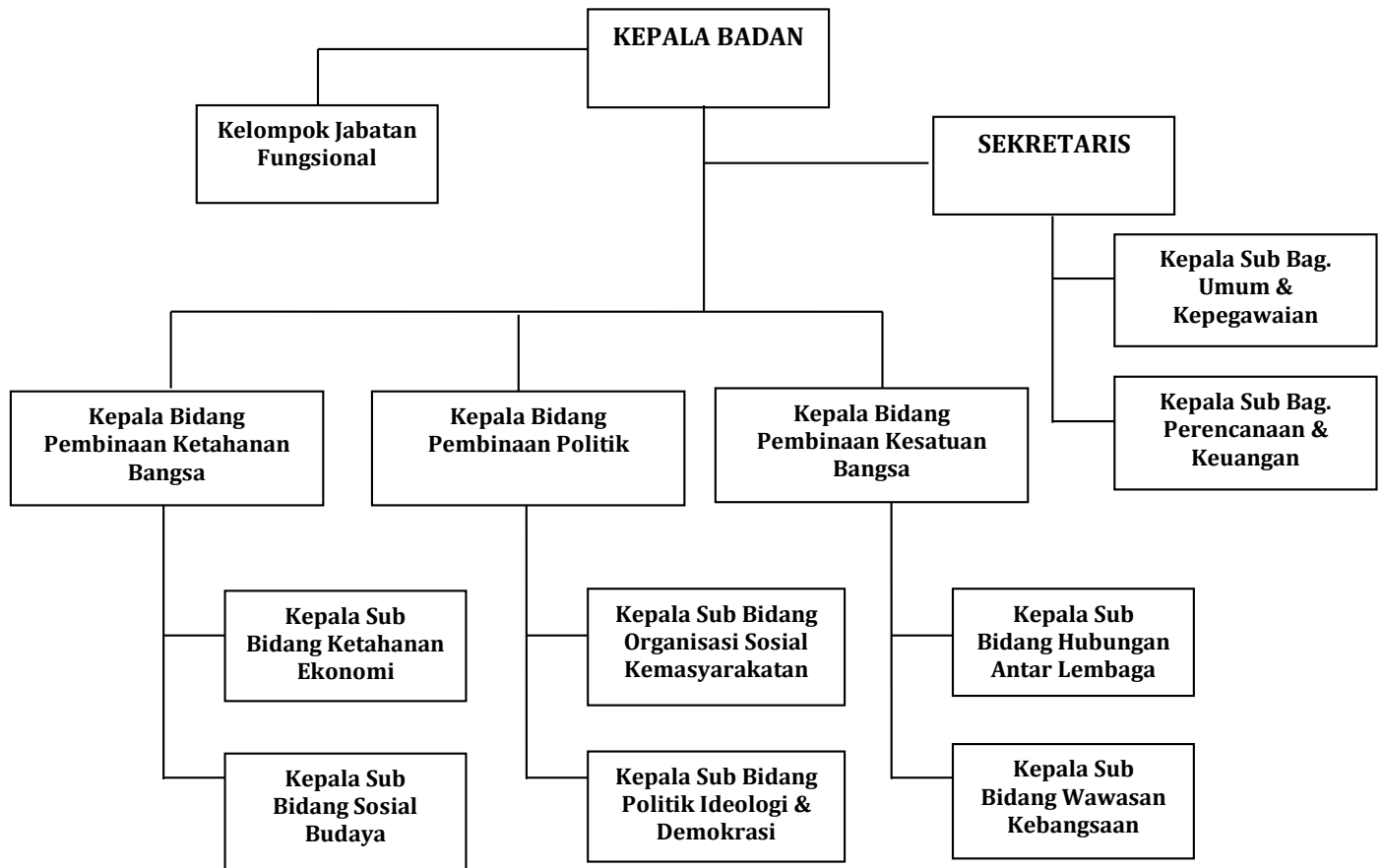
- 2.1 Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 2.2 Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 2.3 Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 2.4 Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan, Tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Kepala Badan Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja badan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan penetapan kinerja badan;

- c. Perumusan perencanaan dan program kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri;
- d. Perumusan kebijaksanaan fasilitas dan pelaksanaan hubungan antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan profesi serta lembaga swadaya masyarakat;
- e. Penghimpun kekuatan dan potensi rakyat dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- f. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas hubungan antar lembaga;
- g. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas kesatuan bangsa;
- h. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas perlindungan masyarakat;
- i. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pengkajian masalah strategis daerah;
- j. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan program di bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- k. Fasilitas dan evaluasi program kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- m. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris.

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan;
- b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
- c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Badan;
- d. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
- g. Pelaksanaan, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait ;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3) Unsur Pelaksana Bidang, terdiri dari :

3.1 Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa

Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa pimpinan oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penyusunan Rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang pembinaan ketahanan bangsa.

Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang politik;
4. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi bidang Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi Sosial Budaya;
6. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang ketahanan Bangsa, Ketertiban Umum dan Kenyamanan lingkungan masyarakat;

7. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan ketahanan bangsa dan pengkajian masalah strategis daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Bidang Pembinaan Politik

Bidang Pembinaan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang pembinaan politik.

Kepala Bidang Pembinaan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
3. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah;
4. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi profesi dan dengan lembaga swadaya masyarakat;
5. Penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan Politik;
7. Pengelolaan/Menghimpun data hasil produk Legislatif sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan;
8. Penyiapan fasilitasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3 Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang kesatuan bangsa.

Kepala Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang ;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
3. Penyusunan rencana dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa, kerukunan umat beragama, pendidikan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat;
4. Penyusunan dan pengembangan usaha pelaksanaan kesatuan bangsa;
5. Perumusan dan pengolahan kegiatan sosialisasi demokrasi dan wawasan kebangsaan;
6. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka kesatuan bangsa;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, tenaga kerja asing dan aliran kepercayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya SDM/aparatur yang memiliki kualitas yang handal dan mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sumber daya manusia (SDM) dengan kuantitas

dan kualitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kinerja instansi di pemerintah, termasuk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan keadaan 01 Januari 2021 berjumlah 20 orang. Berikut terlampir Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Golongan, Eselon, Jenjang Pendidikan dan Keikutsertaan Diklat Struktural:

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	UNIT/BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
1	Kepala Badan				1	1
2	Sekretariat					0
3	Kasub Bag Keuangan dan Perencanaan			1		1
4	Kasub Bag Umum dan Kepegawaian			1		1
5	Bendahara			1		1
6	Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1		1
7	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan			1		1
8	Pengolah Daftar Gaji		1			1
9	Pramubakti		1			1
10	Pengadministrasi Persuratan		1			1
11	Kabid Pembinaan Politik				1	1
12	Kasub Bid Organisasi Sosial Kemasyarakatan			1		1
13	Kasub Bid Politik Ideologi dan Demokrasi					0
14	Kabid Pembinaan Kesatuan Bangsa					0
15	Kasub Bid Hubungan Antar Lembaga			1		1
16	Kasub Bid Wawasan Kebangsaan			1		1
17	Kabid Pembinaan Ketahanan Bangsa				1	1
18	Kasub Bid Ketahanan Ekonomi			1		1
19	Kasub Bid Sosial Budaya					0
20	Pengadministrasi Umum		1	4		5
	TOTAL	0	4	13	3	20

Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	NAMA ESELON	JUMLAH
1	Eselon II/a	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	8
	TOTAL	13

Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	14
3	Sarjana Muda	1
4	SMA Sederajat	3
5	SMP Sederajat	1
	TOTAL	20

Tabel 2.4
Kualifikasi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Spamen	1
2	Diklat PIM Tk III	0
3	Diklat PIM Tk IV	8
	TOTAL	

2.2.2 PENGELOLAAN ASET SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah secara umum digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Anak Timbangan dari besi	1	Baik
2	Alat pengolahan tanah dan tanaman	1	Rusak ringan
3	Alat penyimpanan lain-lain	1	Baik
4	Mesin Keti manual standar (14-16)	7	Rusak berat
5	Rak Kayu	2	Baik
6	Filling Besi/Metal	1	Rusak ringan
7	Filling Kayu	1	Baik
8	Lemari Sorok	1	Rusak ringan
9	Papan Pengumuman	2	Rusak Ringan
10	White Board	1	Baik

11	Meja Kayu/rotan	2	Baik
12	Kursi Besi/Metal	1	Rusak berat
13	Meja Rapat	1	Baik
14	Kursi Rapat	1	Rusak ringan
15	Kursi Putar	1	Baik
16	Jam Elektronik	1	Rusak ringan
17	Lampu Lalu lintas (Traffic Light)	1	Rusak ringan
18	Radio	1	Baik
19	Sound system	1	Baik
20	Wireless	1	Rusak ringan
21	Megaphon	1	Rusak ringan
22	Microphon	1	Baik
23	Kaca Hias	1	Rusak Berat Sekali
24	Dispenser	1	Rusak Berat Sekali
25	P.C Unit/ Komputer PC	2	Rusak Berat Sekali
26	Printer	1	Rusak Berat Sekali
27	Handycam	1	Rusak Berat Sekali
28	Pesawat Telephone	1	Baik (Pesawat Ring)
29	Handy Talky	3	Rusak Ringan
30	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Rusak Ringan
31	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2	Rusak Ringan
32	Pesawat Kip	1	Rusak Berat

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan Pelayanan Publik yaitu segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab, dan dilaksanakan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel pada tabel 2.6 dan table 2.7 berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas																		
1	Pelayanan Ijin Survey/Penelitian bagi Masyarakat/Mahasiswa/i	-	-	-	50	100	300	300	300	44	177	694	590	374	88	177	231,33	196,67	124,67
2	Pelayanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Yayasan	-	-	-	25	25	17	17	17	25	23	13	22	7	100	92	76,47	129,41	41,17
3	Rekomendasi bantuan dana Hibah Pengurus PARPOL	-	-	-	16	16	16	16	16	11	11	11	12	12	68,75	68,75	68,75	75	75
4	Rekomendasi Penerbitan SKT/SKM LSM/Yayasan	-	-	-	25	25	17	17	17	0	28	23	24	23	0	112	135,29	141,18	135,29
B	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Budaya Politik																		
5	Presentasi Hak Pilih Dalam Pileg & Pilpres	-	-	-	0	0	0	70	0	0	0	0	76,87	0	0	0	0	109,8	0
6	Presentasi Hak Pilih Dalam Pilkada & Pilkadaes	-	-	-	0	0	0	0	70	0	0	0	0	72,37	0	0	0	0	103,38

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																		
1	Jumlah Pelaksanaan Kemah Bakti	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
2	Jumlah Pertemuan FKUB	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	100	100	100	100	50
3	Jumlah Pelaksanakan Seminar Diskusi Wawasan kebangsaan	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	100	0
D	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																		
1	Jumlah Sosialisasi Narkoba & Radikalisme	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	100	100	100	100	50
2	Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-									267	103					
E	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																		
1.	Jumlah Kasus Kriminalitas	-	-	-									480	378					
2.	Jumlah Potensi Konflik terselesaikan	-	-	-									32%	46%					
3.	Jumlah Kriminalitas yang melibatkan Orang Asing	-	-	-									6	11					

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(6)	(7)	(8)	(2)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Belanja Langsung	2.444.956.376	2.166.074.000	1.828.901.000	1.759.978.000	1.759.063.200.00	1.333.556.700	2.498.835.370	1.732.235.732	1.700.536.144	1.707.755.066	71,34	93,00	94,71	96,62	97,08		
Belanja Tidak Langsung	2.162.654.056,03	2.610.669.416	2,050,920.800	2,119,559,091	2,036,092,323	2.018.773.917	1.971.225.740	2,085,646,718	2,023,523,863	1,823,443,705	93,35	91,00	1,016	95,47	89,56		
TOTAL	4.607.610.432,03	4.776.743.416	3.879.821.800	3,879,537,091	3,795,155,523	3.352.330.617	4.470.061.110	3,817,882,450	3,724,060,007	3,527,224,271	72,76	93,60	98,40	95,99	92,94		

Berdasarkan hasil tabel 2.6 di atas diketahui bahwa terdapat pelayanan OPD yang telah mencapai target maksimal dan terdapat kinerja yang belum tercapai secara maksimal dan mengalami kesenjangan atau kurang tertangani dengan baik.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

1. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target pelaksanaan kinerja di daerah.
2. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja program di daerah.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.
4. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistim politik yang demokratis.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah yang berpengaruh terhadap pencapaian target.

2.4.1 Tantangan:

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
4. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.
5. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal Pemerintah Pusat, yang bisa menghambat proses.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
4. Berkurangnya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial di masyarakat;
6. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme.
7. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
8. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;

2.4.2 Peluang :

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.
3. Bentuk demografi yang signifikan dalam mendukung Program pemerintah
4. Pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang masih kuat di masyarakat
5. Terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah dengan Partai Politik
6. Masyarakat yang taat dengan nilai-nilai kearifan local
7. Terbentuknya Forum-Forum Kemasyarakatan dan Keagamaan yang saling mendukung terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain :

1. Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan/penghentian/pemulihan konflik sosial dengan Bale Mediasi sebagai mediator.
4. Peningkatan pendidikan politik dalam masyarakat.
5. Peningkatan penanaman rasa Nasionalisme di tengah masyarakat muda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 TUGAS, IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah mendapat beberapa kendala permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan dan Nasionalisme ;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
- d. Rendahnya tingkat pemahaman dan pelaksanaan nilai wawasan kebangsaan seperti pada kelompok pemuda , pelajar dan lain- lain.

3.1.2 Bidang Pembinaan Politik

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran berpolitik dalam masyarakat
- b. Masih kurangnya kerjasama dan saling kesepahaman antar dan inter lembaga dan pengurus partai politik serta organisasi masyarakat yang ada.
- c. Kemandirian partai politik dan organisasi masyarakat yang masih bergantung pada perhatian pemerintah.
- d. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat yg masih di bawah target.
- e. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

3.1.3 Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa

- a. Masih belum berjalannya sistem temu dan lapor cepat segala bentuk kejadian konflik sosial dari tingkat rendah sampai kabupaten.
- b. Ketersediaan dan sistem pendataan yang belum maksimal.
- c. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba.

- d. Masih terdapat sekat terhadap toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
- f. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Rendahnya tingkat pemahaman dan pelaksanaan nilai wawasan kebangsaan seperti pada kelompok pemuda , pelajar dan lain- lain.
			Masih terdapat sekat terhadap toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan;
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Adanya kesenjangan ekonomi di daerah,

			yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Masih rendahnya tingkat kesadaran berpolitik dalam masyarakat
			Masih kurangnya kerjasama dan saling kesepahaman antar dan inter lembaga dan pengurus partai politik serta organisasi masyarakat yang ada.
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
			Kemandirian partai politik dan organisasi masyarakat yang masih bergantung pada perhatian pemerintah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Visi

Dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung untuk periode 2021-2026, serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, maka dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan Lombok Tengah yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah, *Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)*.

2. Misi

Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dikembangkan 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut :

- 1) Merawat Akhlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
- 3) Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
- 4) Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Sedangkan dari penjabaran visi dan misi tersebut kemudian dituangkan beberapa Tujuan dan Sasaran Antara lain:

Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama.

Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul

Misi kedua ini mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih

Misi ketiga ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas

Misi keempat ini mempunyai tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang dapat dicapai dengan pencapaian sasaran:
 1. Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial; dan
 2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif.
- b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:
 1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 2. Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten;
 3. Meningkatnya akses air minum aman;
 4. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 5. Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan
 6. Meningkatnya ketahanan bencana.

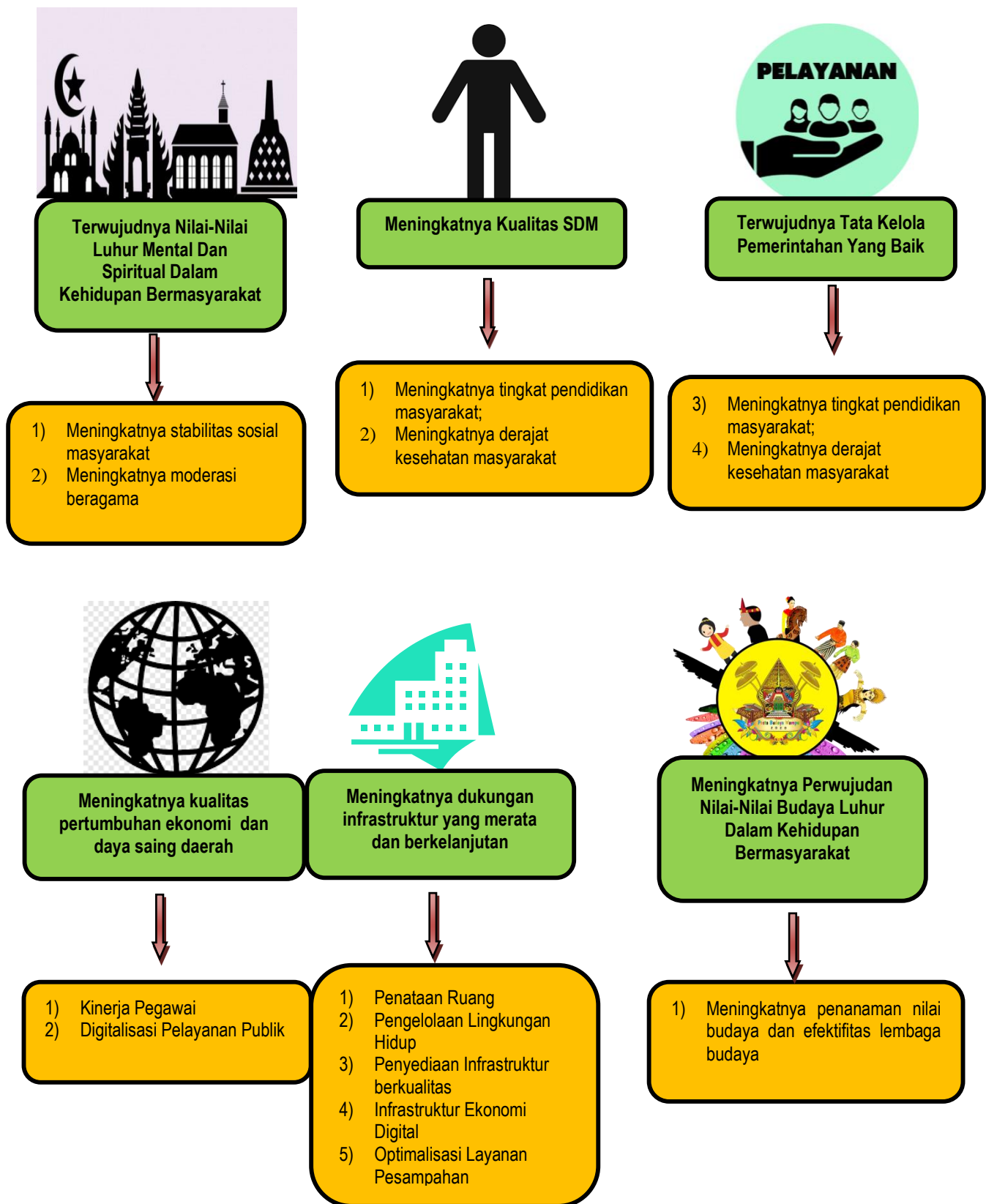
Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Misi kelima ini mempunyai tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.

Adapun Tujuan dan Sasaran atas Misi tersebut tertuang dalam Gambar berikut:

Gambar 3.1

Tujuan dan Sasaran dalam Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah
2021-2026



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu arah kebijakan yang di susun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Misi ke-1 yaitu : "Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat". Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama. Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah ditugaskan untuk membantu tercapainya tujuan kepala daerah yang berfokus pada pencapaian sasaran Misi 1 baik pada sasaran 1 dan sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat" dan "Meningkatnya moderasi beragama". Dimana hal tersebut akan dituangkan pada "Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial" serta "Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya". Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan peran lembaga mediasi desa dalam penyelesaian konflik sosial, dengan cara Bale Mediasi Kabupaten yang akan menjadi media penyelesaian konflik perdata maupun pidana ringan di tengah masyarakat baik dari tingkat desa sampai kabupaten. Dimana Bale Mediasi akan beranggotakan Tokoh-tokoh Agama dan tenaga-tenaga ahli sebagai mediator di tengah masyarakat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Sekertariat Bale Mediasi Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam mencapai sasaran ke 2 Bakesbangpol berperan dalam pembinaan dan koordinasi dengan Forum kerukunan Beragama atau FKUB.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 dengan Visi yaitu : "*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)* dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*", yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 misi yaitu :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri

- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan layanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan admin istrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kab/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kab/Kota.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.” Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.”

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2021-2026, dan 3) Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
2. Pembinaan Ketahanan, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan ekonomi
3. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Antar Sektoral
4. Pembinaan Politik dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun tahun 2021–2026 menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT”** dan **“TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan sasaran **“Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya”** dan **“Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		Indeks sikap	3,5	3,6	3,7	3,,8	4,0
			Indeks kerjasama dan hubungan sosial	3,5	3,6	3,7	3,,8	4,0
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Yang Seimbang Dengan Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Konflik berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2	TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Menunjuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)			
MISI I: Merawat Akhlaqul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Nilai-Nilai Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang seimbang dengan kehidupan social budaya	1.1 Fasilitasi 1.2 Mediasi	1. Melaksanakan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan antar umat beragama 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
Terwujudnya Nilai-Nilai Luhur Mental Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya Stabilitas Sosial Kemasyarakatan	2.1 Motivasi dan Rekonstruksi 2.2 Rehabilitasi	1. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara
		3.1 Proses Hukum 3.2 Fasilitasi Deteksi Dini dan Cegah Dini	1. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama/tokoh masyarakat, tokoh adat dan budaya
		4.1 Revitalisasi, Edukasi, sosialisasi dan Fasilitasi	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/Ormas dan Parpol 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif
		5.1 Edukasi SDM Aparatur 5.2 ASN yang Kompeten 5.3 Inventarisasi 5.4 Kontribusi 5.5 Insentif/reward	1. ASN semua golongan 2. Pejabat yang berwenang 3. Tenaga teknis/ tenaga Ahli

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah periode 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih program – program

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan dalam Program /kegiatan SKPD. Berikut disajikan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1: TERWUJUDNYA NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				Indeks sikap (poin)	3,24	3,40	60.479.754,00	3,50	66.527.729,40	3,60	73.180.502,34	3,70	80.498.552,57	3,80	88.548.407,83	4,00	97.403.248,61	4,00	97.403.248,61	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
				Indeks kerjasama dan hub sosial (poin)	3,24	3,40		3,50		3,60		3,70		3,80		4,00		4,00			
	Sasaran 1: Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama yang Seimbang dengan kehidupan Sosial Budaya			Persentase Konflik berlatar belakang SARA yang tertangani	0	100	60.479.754	100	66.527.729	100	73.180.502	100	80.498.553	100	88.548.408	100	97.403.249	100	97.403.249	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba (%)	-	1,43	60.479.754	2,15	66.527.729	2,86	73.180.502	4,30	80.498.553	5,73	88.548.408	7,19	97.403.249	7,19	97.403.249	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
			Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama (%)	-	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00									
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) (jumlah desa)	-	2	60.479.754	3	66.527.729	4	73.180.502	6	80.498.553	8	88.548.408	8	97.403.249	10	97.403.249	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (dokumen)	2	2	3.942.520	1	4.336.771	1	4.770.449	1	5.247.493	1	5.772.243	1	6.349.467	1	6.349.467	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (dokumen)	Data dan informasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1	1	3.942.520	1	4.336.771	1	4.770.449	1	5.247.493	1	5.772.243	1	6.349.467	1	6.349.467	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Fasilitasi Desa Bersinar) (kegiatan)	-	1	15.200.000	1	16.720.000	1	18.392.000	1	20.231.200	1	22.254.320	1	24.479.752	1	24.479.752	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan hasil Koordinasi TIMDU PKS, PAKEM, FKUB	1	1	23.400.000	1	25.740.000	1	28.314.000	1	31.145.400	1	34.259.940	1	37.685.934	1	37.685.934	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Profile Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Lombok Tengah	1	1	13.994.715	1	15.394.187	1	16.933.605	1	18.626.966	1	20.489.662	1	22.538.628	1	22.538.628	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 2: TERWUJUDNYA NILAI-NILAI LUHUR MENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				Persentase Penurunan Konflik Sosial	0	100	4.635.762.282	100	5.933.243.550	100	6.228.267.905	100	6.855.044.696	100	7.539.329.165	100	8.290.968.082	100	8.290.968.082	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
	Sasaran 2: Meningkatkan stabilitas sosial kemasyarakatan			Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	0	100		100		100		100		100		100		100		Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
				Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	0	100	4.635.762.282	100	5.933.243.550	100	6.228.267.905	100	6.855.044.696	100	7.539.329.165	100	8.290.968.082	100	8.290.968.082	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100	100	101.015.020	100	166.984.063	100	183.682.469	100	202.050.716	100	222.255.788	100	244.481.367	100	244.481.367	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlibatan masyarakat lintas agama dan ras	-	100	101.015.020	100	166.984.063	100	183.682.469	100	202.050.716	100	222.255.788	100	244.481.367	100	244.481.367	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	3	4.984.235	3	6.977.929	3	7.675.722	3	8.443.294	3	9.287.623	3	10.216.386	3	10.216.386	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Data dan Informasi Wilayah Rawan Konflik	-	1	4.984.235	1	6.977.929	1	7.675.722	1	8.443.294	1	9.287.623	1	10.216.386	1	10.216.386	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Kemah Bakti, Seminar Diskusi 4 Pilar & Sosialisasi GNRM)	2	2	38.266.550	3	92.093.205	3	101.302.526	3	111.432.778	3	122.576.056	3	134.833.661	3	134.833.661	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan hasil koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1	43.190.000	1	47.509.000	1	52.259.900	1	57.485.890	1	63.234.479	1	69.557.927	1	69.557.927	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen laporan monev proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1	9.590.000	1	13.426.000	1	14.768.600	1	16.245.460	1	17.870.006	1	19.657.007	1	19.657.007	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	74	0		0		0		76		0		0		0		Badan Kesbangol	Lombok Tengah
				Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Kesbangol	Lombok Tengah
				Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	10	25	978.254.899	40	1.076.080.389	50	1.183.688.428	55	1.302.057.271	60	1.432.262.998	65	1.575.489.297	65	1.575.489.297	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Wawasan (Pemahaman) Organisasi Politik	-	100	978.254.899	100	1.076.080.389	100	1.183.688.428	100	1.302.057.271	100	1.432.262.998	100	1.575.489.297	100	1.575.489.297	Badan Kesbangol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	2	3.887.052	3	4.275.757	3	4.703.332	3	5.173.666	3	5.691.032	3	6.260.135	3	6.260.135	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Data dan Informasi PARPOL	1	1	3.887.052	1	4.275.757	1	4.703.332	1	5.173.666	1	5.691.032	1	6.260.135	1	6.260.135	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Sosialisasi kepada Pengurus PARPOL Penerima dana hibah, Sosialisasi PEMILU & Pemberian Dana Hibah PARPOL)	2	2	947.198.296	3	1.041.918.126	3	1.146.109.938	3	1.260.720.932	3	1.386.793.025	3	1.525.472.328	3	1.525.472.328	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1	1	4.237.500	1	4.661.250	1	5.127.375	1	5.640.113	1	6.204.124	1	6.824.536	1	6.824.536	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Profile PARPOL di Lombok Tengah	1	1	19.045.000	1	20.949.500	1	23.044.450	1	25.348.895	1	27.883.785	1	30.672.163	1	30.672.163	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	85	87		89		90		91		92		93	93		Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
				Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha	-	-	110.249.489	50	648.574.637	55	713.432.101	60	784.775.311	65	863.252.842	70	949.578.126	70	949.578.126	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat	-	-	110.249.489	100	648.574.637	100	713.432.101	8	784.775.311	8	863.252.842	8	949.578.126	8	949.578.126	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	2	8.639.245	2	9.503.169	2	10.453.486	2	11.498.834	2	12.648.718	2	13.913.590	2	13.913.590	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Kajian Pembinaan Ormas dan Dokumen Rancangan Kebijakan Pembinaan Ormas	-	-	8.639.245	2	70.000.000	2	77.000.000	2	84.700.000	2	93.170.000	2	102.487.000	2	102.487.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan (Dialog Publik Ormas & Orpo dan Pemberian Dana Hibah Ormas)	2	2	57.905.000	2	513.198.668	2	564.518.535	2	620.970.388	2	683.067.427	2	751.374.170	2	751.374.170	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi	1	1	14.320.000	1	17.080.000	1	18.788.000	1	20.666.800	1	22.733.480	1	25.006.828	1	25.006.828	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Profile ORMAS	1	1	20.746.000	1	38.792.800	1	42.672.080	1	46.939.288	1	51.633.217	1	56.796.538	1	56.796.538	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase penyelesaian Konflik Sosial	100	100	659.561.885	100	725.518.074	100	798.069.881	100	877.876.869	100	965.664.556	100	1.062.231.011	100	1.062.231.011	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik	3	3	659.561.885	4	725.518.074	4	798.069.881	4	877.876.869	4	965.664.556	4	1.062.231.011	4	1.062.231.011	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	4.788.425	1	5.267.267	1	5.793.994	1	6.373.393	1	7.010.732	1	7.711.806	1	7.711.806	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Data dan Informasi Potensi & Penanganan Konflik Sosial	1	1	4.788.425	2	5.267.267	2	5.793.994	2	6.373.393	2	7.010.732	2	7.711.806	2	7.711.806	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Laporan Pelaksanaan Kebijakan (Bale Mediasi)	-	1	107.500.000	1	1.318.250.000	1	1.450.075.000	1	1.595.082.500	1	1.754.590.750	1	1.930.049.825	1	1.930.049.825	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Laporan hasil Koordinasi TKDPD & TIM PORA	2	2	16.250.000	2	17.875.000	2	19.662.500	2	21.628.750	2	23.791.625	2	26.170.788	2	26.170.788	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peta Potensi Konflik Sosial di Daerah	1	1	29.685.036	1	32.653.540	1	35.918.894	1	39.510.783	1	43.461.861	1	47.808.047	1	47.808.047	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)	Persentase Kebijakan FORKOPIMDA yg ditindaklanjuti	100	100	604.050.000	100	664.455.000	100	730.900.500	100	803.990.550	100	884.389.605	100	972.828.566	6	972.828.566	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	CC	B	2.786.680.989	B	3.316.086.388	BB	3.349.395.027	BB	3.688.284.529	BB	4.055.892.982	BB	4.459.188.281	BB	4.459.188.281	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9	10	30.670.770	9	33.737.847	9	37.111.632	10	40.822.795	9	44.905.074	9	49.395.582	10	49.395.582	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan PD (Renstra, Renja, Renja Perubahan)	2	3	9.201.231	2	10.121.354	2	11.133.490	3	12.246.838	2	13.471.522	2	14.818.675	2	14.818.675	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.067.077	1	3.373.785	1	3.711.163	1	4.082.279	1	4.490.507	1	4.939.558	1	4.939.558	Badan Kesbangol	Lombok Tengah
		8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.067.077	1	3.373.785	1	3.711.163	1	4.082.279	1	4.490.507	1	4.939.558	1	4.939.558	Badan Kesbangol	Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1	1	3.067.077	1	3.373.785	1	3.711.163	1	4.082.279	1	4.490.507	1	4.939.558	1	4.939.558	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.067.077	1	3.373.785	1	3.711.163	1	4.082.279	1	4.490.507	1	4.939.558	1	4.939.558	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, LKPD)	3	3	9.201.231	3	10.121.354	3	11.133.490	3	12.246.838	3	13.471.522	3	14.818.675	3	14.818.675	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	19	19	2.506.750.929	19	2.757.426.022	19	3.033.168.624	19	3.336.485.486	19	3.670.134.035	19	4.037.147.439	19	4.037.147.439	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14	14	2.478.250.929	14	2.726.076.022	14	2.998.683.624	14	3.298.551.986	14	3.628.407.185	14	3.991.247.904	14	3.991.247.904	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1.500.000	1	1.650.000	1	1.815.000	1	1.996.500	1	2.196.150	1	2.415.765	1	2.415.765	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan	12	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	12	23.958.000	12	26.353.800	12	28.989.180	12	28.989.180	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
				Laporan keuangan triwulanan	4	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.260.000	4	7.986.000	4	8.784.600	4	9.663.060	4	9.663.060	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
				Laporan keuangan semesteran	2	2	3.000.000	2	3.300.000	2	3.630.000	2	3.993.000	2	4.392.300	2	4.831.530	2	4.831.530	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	1	1	112.102.290	1	185.912.519	1	208.703.771	1	233.524.148	1	255.656.563	1	278.928.219	1	278.928.219	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer dan perlengkapannya	1	-	-	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
				Printer	2	2	4.000.000	4	8.000.000	6	12.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	8	16.000.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
				Laptop	1	1	10.000.000	1	12.500.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
				Alat kebersihan	18	18	2.150.290	18	2.365.319	18	2.601.851	18	2.862.036	18	3.148.240	18	3.463.064	18	3.463.064	18	3.463.064	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
				Peralatan dan perlengkapan lainnya	2	-	-	2	20.000.000	3	24.000.000	4	28.800.000	4	34.560.000	4	41.472.000	4	41.472.000	4	41.472.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah
		8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan RT	1	-	-	1	8.000.000	1	8.800.000	1	9.680.000	1	10.648.000	1	11.712.800	1	11.712.800	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	12	12	21.600.000	12	23.760.000	12	26.136.000	12	28.749.600	12	31.624.560	12	34.787.016	12	34.787.016	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	-	-	-	2	7.000.000	2	7.700.000	2	8.470.000	2	9.317.000	2	10.248.700	2	10.248.700	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	3	4.440.000	3	4.884.000	3	5.372.400	3	5.909.640	3	6.500.604	3	7.150.664	3	7.150.664	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	10	17	69.912.000	18	76.903.200	19	84.593.520	20	93.052.872	21	102.358.159	22	112.593.975	22	112.593.975	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat	1	3	96.657.000	3	285.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000	2	14.641.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas	-	3	96.657.000	1	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	1	-	-	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000	2	14.641.000	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12	12	14.400.000	12	25.300.000	12	27.830.000	12	30.613.000	12	33.674.300	12	37.041.730	12	37.041.730	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	-	-	-	10	7.300.000	10	8.030.000	10	8.833.000	10	9.716.300	10	10.687.930	10	10.687.930	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan umum kantor	12	12	14.400.000	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	12	23.958.000	12	26.353.800	12	26.353.800	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	19	19	26.100.000	19	28.710.000	19	31.581.000	19	34.739.100	19	38.213.010	19	42.034.311	19	42.034.311	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	19	19	18.500.000	19	20.350.000	19	22.385.000	19	24.623.500	19	27.085.850	19	29.794.435	19	29.794.435	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
				STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	19	19	7.600.000	19	8.360.000	19	9.196.000	19	10.115.600	19	11.127.160	19	12.239.876	19	12.239.876	Badan Kesbangpol	Lombok Tengah	
Total Anggaran Kegiatan								4.696.242.036		5.999.771.280		6.301.448.408		6.935.543.248		7.627.877.573		8.388.371.331		8.388.371.331		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja utama yang mengacu kepada indikator kinerja perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Indeks sikap	3,24	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00	4,00
2	Indeks kerjasama dan hub sosial	3,24	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00	4,00
3	Persentase Konflik berlatar belakang SARA yang tertangani	0	100	100	100	100	100	100	0
4	Persentase Desa yang mencanangkan Desa Bebas Narkoba	-	1,43	2,15	2,86	4,30	5,73	7,19	7,19
5	Meningkatnya Pemahaman Potensi Terjadinya Konflik Masyarakat berlatar agama	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Terbentuknya Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)	-	2	3	4	6	8	8	10
12	Persentase Penurunan Konflik Sosial	0	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase konflik berlatar belakang politik terselesaikan	0	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase konflik berlatar belakang sosial ekonomi terselesaikan	0	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Keterlibatan masyarakat lintas agama dan ras	-	100	100	100	100	100	100	100
22	Presentase penyelesaian Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik	3	3	4	4	4	4	4	4
30	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	85	87	89	90	91	92	93	93
31	Persentase Ormas Yang Bermitra dengan Pemerintah & Dunia Usaha	-	-	50	55	60	65	70	70

32	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat	-	-	100	100	8	8	8	8
38	angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	74	0	0	0	76	0	0	0
39	Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	10	25	40	50	55	60	65	65
41	Meningkatnya Wawasan (Pemahaman) Organisasi Politik	-	100	100	100	100	100	100	100
47	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
48	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9	10	9	9	10	9	9	10
55	Dokumen administrasi keuangan PD	19	19	19	19	19	19	19	19
61	Laporan administrasi umum PD	1	1	1	1	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tengah Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lombok Tengah.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lombok Tengah. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak- pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Praya, 8 September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lombok Tengah



MURDI, AP., M.Si
NIP. 197512311994121002